

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkontribusi pada ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam karena lokasinya berada di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudra. Di sisi lain wilayah ini memiliki kondisi geografis, hidrologis, demografis serta geologis yang sangat rentan terhadap bencana, skala kecil maupun skala besar. Dalam hal ini, diperlukan suatu tindakan yang terkoordinasi dengan baik, sistematis dan terpadu.

Ada tiga kategori bencana yang diklasifikasikan dalam pemicu potensi dari bencana di wilayah Indonesia, bencana yang berasal dari alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Untuk bencana yang berasal dari alam berupa letusan gunung, angin topan, gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran hutan alami. Dalam bencana non alam, terdiri dari kebakaran hutan oleh akibat manusia, kecelakaan dari transportasi, imbas dari suatu industri serta ledakan dari nuklir. Adapula bencana yang diakibatkan karena adanya bentrok sosial seperti, kerusuhan, tawuran dan konflik masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu pengelolaan bencana, dimana penanggulangan ini dilakukan sebagai rangkaian dalam mengatasi bencana, baik itu saat sebelum bencana, pada saat maupun setelah suatu bencana itu terjadi.

Oleh karena itu, mengelola risiko bencana dan respons yang efektif sangat penting untuk meminimalkan dampaknya.

Kejadian alam dan tindakan manusia adalah faktor yang dapat menyebabkan bencana. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dapat memiliki efek yang merusak dan memerlukan intervensi dari berbagai aktor untuk menanganinya. Kebijakan publik yang efektif dan tata kelola yang baik adalah faktor penting dalam penanggulangan bencana. Hal ini mencakup peran pemerintah, lembaga swasta, LSM dan masyarakat dalam mengelola risiko bencana dan menyelamatkan nyawa maupun harta benda. Berbagai aktor dalam pengelolaan bencana, seperti pemerintah, LSM, swasta, masyarakat dan aktor lainnya yang terlibat memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Dalam menanggapi bencana, setiap aktor mungkin memiliki tujuan dan rencana yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan bekerja sama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, peranan setiap individu merupakan hal penting karena dengan menjalankan peran masing-masing, fungsi pokok individu dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya, setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda tergantung kondisi dan lingkungan sekitarnya. Kaitannya dengan peran individu dalam organisasi atau institusi tentu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan.

Individu, kelompok, dan organisasi dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Budimanta et al. (2008), pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, golongan, komunitas atau masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Individu, kelompok, golongan, komunitas atau masyarakat dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan jika mereka pada dasarnya menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

Fokus tata kelola tidak hanya semata pada tataran teknokratik seperti teknis dan administrasi, melainkan juga dapat berfokus pada tataran sosial seperti pada kondisi aktor yang terlibat dan kepentingannya. Kepentingan dari setiap aktor diperlukan dalam pembuatan kebijakan yang terkadang hal ini diabaikan (Ardianto, 2016: 197).

Kajian disaster governance dengan menganalisis kepentingan aktor berarti meletakkan pengetahuan pelaku atau pemangku kepentingan kebencanaan sebagai fokus kajian. Dalam konsep governance, pelaku dalam ranah pemerintahan tertentu dapat disebut sebagai aktor, aktor tersebut tidak mesti adalah pemerintah, melainkan juga dapat swasta, masyarakat dan aktor lainnya. (Mas'udi & Karim, 2021: 195). Oleh sebab itu, maksud wacana tata kelola kebencanaan dalam tulisan ini adalah sejauh mana kepentingan aktor dalam isu-isu disaster governance. Berdasarkan uraian di atas, kerangka konsep yang kemudian digunakan dalam tulisan ini adalah isu politik tata kelola bencana, yaitu pada bagaimana kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat. Pada tata kelola secara umum, konsep governance

hanya mewadahi tiga aktor, yaitu pemerintah (public), swasta (private) dan masyarakat (society) (Peters & Pierre, 1998: 223). Pada tata kelola kebencanaan, konsep disaster governance menyebut tentang peran pemerintah, swasta, LSM, masyarakat, akademisi, media dan lainnya (Dinar, 2020: 155). Dalam tata kelola kebencanaan secara praktis, aktor-aktor disebut penta-helix, yaitu pemerintah, pengusaha, komunitas, media dan akademisi.

Tata kelola penanggulangan bencana memiliki peran penting dalam menjamin pencapaian tujuan penanggulangan bencana. Dalam kasus banjir, tata kelola yang terorganisir dan koordinatif dapat memastikan bahwa informasi lintas, koordinasi dan kunjungan kepada korban dan daerah terkena bencana dilakukan secara lebih tepat, cepat, terencana, dan terarah. Organisasi khusus tanggap darurat dan posko induk serta posko lapangan dapat membantu dalam koordinasi dan pendataan korban serta sarana prasarana yang rusak.

Dalam analisis kepentingan aktor dalam kasus pengelolaan bencana banjir, pemerintah memiliki peran utama dalam menjamin koordinasi dan tata kelola penanggulangan bencana. Mereka harus memastikan bahwa rencana penanggulangan bencana disusun dan diperbarui secara periodik, serta meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Lembaga seperti Dinas Pemadam Kebakaran, PMI, Satpol PP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Mereka harus berkoordinasi dan bermitra untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Masyarakat harus memiliki kapasitas dan kemandirian untuk menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus memperluas pengetahuan dan keterampilan

masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana sangat penting. Pemerintah harus membangun sistem distribusi logistik yang efektif dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam penanggulangan bencana.

Dengan demikian, analisis kepentingan aktor dalam kasus pengelolaan bencana banjir menunjukkan bahwa tata kelola, koordinasi, perencanaan, kebijakan, dan teknologi semua memiliki peran penting dalam menghadapi dan menanggulangi bencana banjir.

Penanggulangan bencana terdiri dari tiga komponen: kesiapsiagaan, penanggulangan saat bencana, dan rekonstruksi pasca bencana. Menurut Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008. BPBD dibentuk untuk menerapkan penanggulangan bencana yang lebih luas untuk menangani bencana di wilayah tertentu. Dalam manajemen distribusi bantuan dan penanggulangan bencana, peran para pemangku kepentingan sangatlah penting. Berbagai pihak perlu bekerja sama dan melakukan pemantauan yang sistematis untuk memastikan bahwa bantuan didistribusikan dengan cepat, tepat dan sesuai dengan tujuannya.

Dalam informasi BPBD tentang bencana banjir di Kota Medan pada 16 September 2023. Informasi ini melibatkan empat kecamatan yang terdampak, termasuk Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, dan Kecamatan Medan Helvetia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan telah melakukan upaya penanggulangan bencana

banjir mengidentifikasi beberapa masalah, seperti kurangnya kemampuan dan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas lain, serta ruang lingkup tugas pemerintah yang beragam. BPBD Kota Medan juga telah melakukan penelitian tentang peranan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Medan. Hujan deras dan banjir, pada 25 September 2023, hujan deras yang mengguyur Kota Medan telah menyebabkan sejumlah jalan terendam banjir. Tinggi air berkisar antara 20 cm hingga 80 cm, menyulitkan akses warga dan kendaraan di beberapa wilayah. Petugas BPBD Kota Medan bahkan menggunakan perahu karet untuk memantau situasi di beberapa daerah yang terdampak.

Nurjanah dkk (2013) menyatakan bahwa manajemen bencana adalah bidang yang mempelajari bencana dan semua aspeknya, terutama risiko bencana dan cara mencegahnya. Perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian dan pengendalian merupakan aspek dinamis dari proses manajemen yang merupakan bagian dari manajemen bencana. Dalam keadaan darurat bencana, manajemen yang baik dan kerja sama dengan organisasi swasta dan publik sangat diperlukan karena masyarakat sangat membutuhkan tindakan cepat. Setiap pihak harus bekerja sama satu sama lain untuk memperbaiki kerusakan setelah bencana. Setiap pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Penelitian sebelumnya mungkin telah meneliti beberapa aspek manajemen bencana, termasuk manajemen risiko dan peran pemerintah. Namun, ada kebutuhan untuk memahami mengenai saling-silang kepentingan dari para pemangku kepentingan dan kepentingan aktor yang terlibat pengelolaan bencana, khususnya pada bencana

banjir. Penelitian ini mengkaji peran dan kepentingan aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana interest/kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interest/kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang politik tata kelola bencana dengan mengidentifikasi kepentingan aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi alat pembelajaran dan referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

1.5 Penelitian Terdahulu

“Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo” oleh Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, Farhat Umar (2020). Ditunjukkan bagaimana keberhasilan pengembangan destinasi wisata membutuhkan analisis tentang karakteristik aktor terkait dengan hubungan antar aktor, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi aktor berdasarkan kekuatan dan hubungan antar aktor serta sikap aktor terhadap tujuan pada pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif-kuantitatif. Analisis data menggunakan metode Mactor (Matrix of Alliances and Conflicts Tactics, Objectives and Recommendations) dalam mengidentifikasi kekuatan, hubungan dan pola aliansi aktor pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Perum Perhutani dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah aktor-aktor dominan. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pelaku Bisnis adalah aktor relay dan Karang Taruna adalah aktor didominasi. Sebagian besar pemangku kepentingan konvergen dalam mendukung tujuan strategis yang akan dicapai.

“Analisis Stakeholder Dalam Pengurangan Risiko Banjir di Provinsi DKI Jakarta” oleh Fildzah Alifah Azzahra (2021). Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peran serta stakeholders dalam pengurangan risiko banjir di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu perpaduan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling yang terdapat 27 stakeholder Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan wawancara terhadap 27 informan kunci. Teknik analisis data menggunakan program MACTOR (Matrix of Alliances and Conflict Tactics, Objectives, and Recommendations) dengan menggambar pengaruh antar aktor terhadap aktor lainnya yang ditunjukkan dengan skor kuadran semakin besar nilai semakin menunjukkan besarnya pengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 27 stakeholder Pemerintah Provinsi dalam pengurangan risiko banjir ini mereka memiliki pengaruh dan ketergantungan yang berbeda – beda dimulai dari income, pemberdayaan lingkungan, pembangunan daerah, dan keselamatan jiwa. Hasil Kuadran I dengan pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah memiliki kepentingan dalam misi lingkungan yaitu mengawasi ketaatan lingkungan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pengendalian bencana banjir, Kuadran II dengan pengaruh dan ketergantungan tinggi memiliki kepentingan memimpin, mengawasi, dan mengoordinasikan mitigasi bencana banjir dan ketergantungan tinggi terhadap banyak instansi agar mitigasi banjir berjalan dengan lancar, Kuadran III dengan pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi terhadap penanganan banjir untuk memenuhi pekerjaannya karena aktivitasnya dapat mempengaruhi sekitarnya, stakeholder yang tergabung dalam posisi Kuadran IV ini memiliki peran yang masih rendah dan pengaruh, ketergantungannya rendah dalam pengendalian banjir. Dalam upaya pengurangan risiko banjir di Provinsi DKI Jakarta BPBD dan Kepala BPBD mempunyai peran sentral bersama dengan SEKDA, Walikota, Camat dan Lurah setempat. Sedangkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan aktor yang mempunyai pengaruh paling rendah dalam pengurangan

risiko banjir ini. Peran dan fungsi stakeholder sangat dibutuhkan dalam pengendalian bencana banjir. Maka, penelitian ini mengeksplorasi peran-peran yang dilakukan oleh stakeholder.

"Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi" oleh Saut Sagala, Fernando Situngkir, dan Ramanditya Wimbartha (2013). Studi ini meningkatkan pemahaman tentang bagaimana berbagai pihak berinteraksi saat merekonstruksi perumahan di Kecamatan Pangalengan yang terkena dampak gempa di Jawa Barat pada 2009. Studi kualitatif ini berfokus pada pola peran yang diambil oleh setiap aktor dan bagaimana interaksi satu sama lain dalam rekonstruksi perumahan di Kecamatan Pangalengan. Penelitian ini menemukan bahwa 18 aktor berperan penting dalam proyek tersebut. Visualisasi jejaring aktor dan kuantifikasi hubungan antar aktor menghasilkan jejaring yang memiliki kerapatan yang rendah. Pemerintah, masyarakat, bisnis, donor, dan kelompok eksternal adalah empat aktor utama jejaring.

"Problematika Penanganan Pasca Bencana Alam: Relasi Kuasa Dalam Penyediaan Hunian Sementara di Kota Palu" oleh Angga Pradana, Prof. Dr. Haryanto, MA (2020). Studi kebencanaan berfokus pada hubungan kuasa antar pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan hunian sementara setelah bencana alam. Studi ini dimulai dengan beberapa penelitian politik yang mengakui bahwa situasi bencana memiliki aspek politik. Studi ini menggunakan positivisme dan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi antar sektor dalam menyediakan hunian sementara bagi korban bencana pasca bencana tidak hanya disebabkan oleh kemanusiaan. Studi ini menunjukkan bagaimana hubungan

kekuasaan terjadi di antara pihak yang bekerja dalam penanganan pasca bencana. Kolaborasi sektoral antara lembaga pemerintah dan non pemerintah sangat penting dan rumit dalam pemulihan setelah bencana. Kemudian, karena pembagian peran antar aktor yang tidak adil, tidak ada aturan yang mengikat yang dapat digunakan sebagai referensi bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, aktor dominan pemerintah dan lembaga non-pemerintah bermain di bidang masing-masing.

“Tata Kelola Penanggulangan Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan” oleh Aziizah Rahmasari (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat belum dilakukan secara sistematis di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Penanggulangan Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Gowa di kaji dari 2 (dua) proses kolaborasi yang mempengaruhi pengelolaan tanggap darurat bencana, yaitu : proses dialog tatap muka dan proses membangun kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di kabupaten gowa belum dilakukan secara sistematis dilihat dari 2 (dua) proses kolaborasi yang dinilai masih kurang baik dalam mendukung pengelolaan tanggap

darurat bencana yang menyebabkan kurangnya hubungan komunikasi antar pihak untuk membangun pemahaman yang sama dalam mempersiapkan segala bentuk perencanaan dan strategi pelaksanaan tanggap darurat. Selain itu terdapat keterbatasan informasi, kurangnya sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menjadi faktor penyebab penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat belum dilakukan secara sistematis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

“Wacana Tata Kelola Kebencanaan: Kajian Pembicaraan Aktor Melalui Analisis Media Sosial Twitter” oleh Sapto Setyo Nugroho, Daniel Pasaribu. Penelitian ini mengkaji tentang wacana tata kelola kebencanaan di Indonesia. Dengan berfokus pada wacana, kajian bencana dapat dilihat dengan perspektif ilmu sosial dan dengan pendekatan tata kelola diskursif. Tulisan ini juga sebagai upaya alternatif dari dominannya konsep “manajemen bencana” pada kajian dan pembicaraan di ruang publik. Kajian dilakukan dengan pencarian data primer pada satu kata kunci yaitu “Penanggulangan Bencana” di media sosial Twitter dengan bantuan aplikasi social network analyzer. Melalui skema analisis teks, kognisi sosial dan analisis sosial, hasil pengumpulan dan analisis data menunjukkan dominannya pembicaraan dan peran pemerintah serta signifikansi aktor lainnya yang beragam. Hal ini mendiskusikan terkait model “double track policy-making” yang belum diorganisasikan dan perilaku sadar bencana melalui pandangan “living with disaster” yang belum diinternalisasikan.

“Collaborative Governance dan Social Capital: Peran Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Disaster Management di Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Prawira Yudha Pratama, Achmad Nurmandi (2020). Ditunjukkan bagaimana kerja sama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam mengelola kebencanaan serta bagaimana model sosial berkembang dalam masyarakat setelah erupsi Merapi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Setelah erupsi tahun 2010, komunitas yang sadar bencana telah meningkat. Berdasarkan temuan studi ini, pemuda terlibat dalam pembentukan komunitas tanggap bencana untuk meningkatkan ketahanan sosial dalam kesiapsiagaan kebencanaan menghadapi erupsi Merapi. Komunitas dibentuk oleh sifat manusiawi, sukarela, kohesi sosial, kepercayaan, dan solidaritas. Mereka juga aktif membangun jaringan atau basis massa yang memberikan informasi aktual kepada masyarakat lokal. Pemerintah dan berbagai pihak terkait menawarkan pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat lokal.

“Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami Di Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Collaborative Governance” oleh Ichwan Nurutdin Machruf, Dedy Hermawan, Intan Fitri Meutia (2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaboratif akan sangat membantu untuk memaksimalkan pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. Sebelum bencana tsunami terjadi, kerja sama telah dilakukan, mulai dari perencanaan anggaran, ketersediaan sumber daya, sarana, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Untuk melindungi dan mempersiapkan Kabupaten Lampung Selatan dari bencana tsunami, organisasi kebencanaan seperti

BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial Lampung Selatan, masyarakat, dan lembaga usaha telah bekerja sama.

Tika Mutiarawati dan Sudarno dalam "Collaborative Governance Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan" (2021). Studi ini menunjukkan cara pemangku kepentingan bekerja sama untuk menyelesaikan banjir pasang surut di Kelurahan Bandengan dan mengidentifikasi penyebabnya. Studi kualitatif deskriptif ini dilakukan di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Sumber data studi menunjukkan bahwa kerja sama masih semi formal dan tidak ada konsensus di antara pemangku kepentingan tentang cara khusus untuk menyelesaikan banjir pasang surut. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa beberapa tugas pertemuan kolaborasi tidak berhasil karena ketidakpercayaan antara pemangku kepentingan, tata pemerintahan yang buruk, kekurangan sumber daya, dan ketidakseimbangan dalam pembagian akuntabilitas serta tanggung jawab.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pengertian Bencana

Disaster governance adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara berbagai pihak mengelola ancaman bencana. Tata kelola berasal dari kata "governance", yang berarti suatu proses di mana aktor-aktor berkumpul untuk mengelola sumber daya yang ada secara kolektif. Tetapi kata "bencana" berasal dari kata "disaster". Menurut UNDP, disaster governance adalah proses kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana serta perubahan iklim. Untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana, pemerintah, pegawai, media, swasta, dan LSM bekerja sama di tingkat nasional dan regional dalam pendekatan ini. Disaster governance bukanlah peristiwa bencana itu sendiri secara langsung melainkan berfokus pada konsep tata kelola yang ditujukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Jika ditelusuri dari dasar konsep ilmunya, akar literatur kebencanaan dapat ditemukan baik dari segi ilmu sosial (Oscar Radyan Danar, PHD).

Bencana adalah peristiwa yang dapat mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik alam maupun non-alam. Bencana dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Pusat Pengurangan Bencana Asia (2003) menyatakan bahwa bencana adalah masalah besar yang dihadapi masyarakat yang menyebabkan kerugian fisik dan lingkungan. Karakteristik hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara rentan terhadap

dampak dan risiko bencana, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 1 Ayat (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membagi bencana ke dalam tiga kategori:

1. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami.
2. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi serta wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan manusia. Terorisme, konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat, dan interaksi dengan ancaman kerentanan adalah semua contoh bencana sosial.

1.6.2 Bencana Sebagai Area Politik Kebijakan

Politik kebijakan sebagai produk aktivitas-aktivitas yang terjadi dilingkungan tertentu dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur (Lemieux 1995:7). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik itu provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini pembentukan badan tersebut harus memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari setiap elemen pihak terkait. Hubungan yang baik antara pihak sangat menentukan bagaimana nantinya kualitas serta keberhasilan dalam menanggulangi suatu bencana. Setiap masyarakat harus memiliki ketanggapan terhadap bahaya bencana yang dihadapi

dan cara melindungi dirinya sendiri ketika bencana terjadi, pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi.

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (W.I.Jenkins 1978:15). Kebijakan dan strategi yang ada harus dibuat dengan baik dan komunikasi harus terkoordinasi, supaya keputusan yang dibuat untuk mengatasi bencana dapat dilakukan dengan cara yang sistematis dan praktis.

Penanggulangan bencana melibatkan banyak keputusan politik penting, bencana adalah salah satu bagian penting dari politik kebijakan. Bencana dapat berdampak besar dan signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus membuat kebijakan yang efektif untuk mengurangi risiko, menangani bencana, dan memitigasi kerusakan. Sumber daya publik yang diperlukan untuk mengelola bencana, termasuk anggaran pemerintah, staf, peralatan, dan fasilitas. Keputusan tentang bagaimana sumber daya didistribusikan merupakan bagian dari politik kebijakan.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan bencana, termasuk pemerintah federal dan provinsi, lembaga nirlaba, organisasi internasional, masyarakat harus saling bekerja sama untuk membuat politik kebijakan mengatasi bencana. Dalam hal politik, koordinasi antara semua pemangku kepentingan ini sangat sulit. Kebijakan penanggulangan bencana memerlukan pertimbangan etika yang

mendalam. Pertimbangan ini mencakup cara mengatasi bencana yang melibatkan kehidupan manusia, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pandangan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan menangani bencana. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipengaruhi oleh tindakan cepat dan keputusan yang baik. Penanggulangan bencana melibatkan banyak elemen kebijakan yang memerlukan tindakan politik yang kuat, pengambilan keputusan, dan pertimbangan yang cermat.

Dalam mengembangkan kebijakan dan strategi untuk menangani bencana dan mengurangi dampak negatifnya. Bencana membutuhkan identifikasi apa yang akan terjadi, analisis dampak dan hasilnya, dan tindakan lanjutan terhadap bencana, seperti mitigasi dan pencegahan, persiapan untuk bencana, respons cepat terhadap bencana, dan pemulihan. Ketika pemerintah dan masyarakat siap menghadapi bencana, dampak bencana dan kerugian masyarakat dapat ditekan atau diperkecil. Jika pemerintah dan masyarakat tidak siap, kerugian akan lebih besar dan berlarut-larut, sehingga lebih sulit untuk mengatasinya. Sebuah tata kelola pemerintah yang terorganisir berperan sangat penting dalam menjaga warga negaranya.

Tata kelola yang baik harus memiliki prinsip pemberdayaan, pelayanan, responsif, akuntabilitas serta kepastian hukum untuk menjamin kehidupan masyarakat. Bencana tidak dapat dihindari sepenuhnya, diperlukan manajemen resiko bencana yang baik. Perlu ada fokus, yaitu mengurangi kerentanan risiko efek bencana. Nugroho (2016) membagi manajemen risiko bencana menjadi tiga komponen:

1. Pengurangan dampak bencana melibatkan tindakan pencegahan, mitigasi dan kesiagaan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, dampak negatif dari bencana dapat dikurangi dan dikelola dengan cara yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana.

2. Ketanggapan darurat bencana yang berarti bantuan yang diberikan ketika suatu bencana terjadi sesuai dengan kebutuhan orang yang terkena dampak. Bantuan ini biasanya bersifat mendesak dan membutuhkan tindakan cepat karena mengancam nyawa masyarakat.

3. Pemulihan setelah bencana mengacu pada tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan dengan tujuan memulihkan masyarakat setelah bencana dan memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Dalam prosesnya, politik tata kelola bencana terdiri dari berbagai aspek, yaitu :

a. Kelembagaan, pembentukan satuan di daerah diperlukan untuk mempercepat proses penanggulangan bencana, seperti BPBD dalam menangani setiap bencana dan melibatkan satuan lain, seperti TNI dan Polri.

b. Anggaran, masalah yang sering muncul saat menerapkan anggaran, seperti kurangnya dana yang dialokasikan sehingga tidak dapat membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.

c. Penyelenggaraan, tahapan penanggulangan bencana diperlukan untuk menyelenggarakan kebijakan yang ada. Analisis pra-bencana, darurat bencana, dan setelah bencana sangat penting. Untuk melaksanakan tugasnya, BPBD harus

melakukan koordinasi dan komando yang terpadu dan cepat di wilayah yang terkena dampak bencana.

d. Kebijakan, analisis risiko harus dilakukan saat kebijakan dilaksanakan di lapangan dan melihat bagaimana analisis dampak lingkungan (AMDAL) dilakukan.

1.6.3 Konsestasi Kepentingan dalam Kebijakan Bencana

Teori Handayani dan Warsono (2020) mengidentifikasi dan membagi pemangku kepentingan menjadi tiga kategori yaitu: pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan pendukung dan pemangku kepentingan primer atau masyarakat. Disaster governance mengkaji bahwa dalam penanggulangan bencana diperlukan analisis dari pemangku kepentingan suatu bencana. Dalam konsep governance, pemerintah dianggap sebagai aktor utama dalam menangani bencana. Namun, ada aktor lain yang juga ikut terlibat seperti swasta dan masyarakat. Konflik kepentingan dalam kebijakan bencana dapat muncul antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan bencana dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Tata kelola penyelenggaraan dalam rangka mengurangi risiko dari fenomena kejadian bencana tersebut (Danar, 2020: 11).

Konsestasi konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam kebijakan bencana:

1. Kepentingan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat: dalam membuat kebijakan bencana, pemerintah daerah memiliki prioritas dan sumber daya yang

berbeda dengan pemerintah pusat. Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan atau tujuan dengan pemerintah pusat.

2. Kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan: dalam pengaturan berbagai pihak, terkadang ada konflik antara pihak yang akan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, seperti industri perkebunan atau pertanian, dan pihak-pihak yang memperhatikan keberlanjutan pelestarian lingkungan.

3. Kepentingan publik dengan kepentingan swasta: dalam penanggulangan bencana, pihak-pihak swasta memiliki kepentingan finansial, seperti perusahaan asuransi yang ingin membatasi kewajiban pembayaran klaim, sementara masyarakat umum memiliki kepentingan dalam keamanan dan pemulihan setelah bencana.

4. Kepentingan sosial dengan kepentingan ekonomi: kebijakan yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana dan merespons bencana dapat memiliki efek sosial, seperti pengurangan lapangan kerja atau penggusuran, yang bertentangan dengan kepentingan ekonomi.

5. Kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang: beberapa pemangku kepentingan berkonsentrasi pada tindakan cepat dan pemulihan jangka pendek setelah bencana, sementara yang lain berkonsentrasi pada upaya mitigasi jangka panjang dalam mencegah bencana berikutnya.

6. Kepentingan masyarakat sipil dengan pemerintah: kepentingan ini terjadi ketika lembaga atau organisasi masyarakat sipil memiliki pandangan independen

dan dapat menekan pemerintah untuk bertindak lebih transparan, jujur, dan responsif terhadap masyarakat.

Disaster management mencakup siklus manajemen untuk menanggulangi bencana, dalam hal mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan setelah bencana terjadi. Namun, dalam konsep dan pelaksanaannya, penanggulangan bencana hanya berfokus pada pengelolaan administrasi umum dan teknis. Itu tidak memperhatikan konteks tata kelola yang lebih khusus, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, dikatakan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan. Aktor lain, seperti perusahaan swasta dan lembaga non-pemerintah (LSM), harus berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan untuk menangani masalah masyarakat. Proses yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah ini termasuk kemampuan untuk mengubah input menjadi output, yang membantu meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan publik. Input digambarkan sebagai respons atau tanggapan cepat terhadap perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh bencana, sedangkan output lebih berkaitan dengan bagaimana menanggapi masalah lingkungan sosial dan biofisik. Karena itu, tindakan setiap orang secara tidak langsung memengaruhi alam dan lingkungan.

1.6.4 Aktor dan Kepentingan dalam Tata Kelola Kebijakan Bencana

Peran pemangku kepentingan sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. *Stakeholder* berfungsi untuk mempengaruhi individu dan lembaga yang diperlukan untuk melakukan manajemen penanggulangan bencana. Semua pihak yang terlibat dalam tata kelola kebijakan bencana memiliki kepentingan dan peran masing-masing. Sangat penting untuk merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan pengelolaan bencana yang efektif dengan memahami aktor dan kepentingannya. Pada tata kelola secara umum, konsep governance hanya mewadahi tiga aktor, yaitu pemerintah (public), swasta (private) dan masyarakat (society) (Peters & Pierre, 1998: 223).

Aktor yang terlibat dalam tata kelola bencana dan kepentingannya:

1. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, rencana bencana harus dibuat dan diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Melindungi warga, mengelola respons bencana, dan memitigasi bencana adalah tanggung jawab mereka. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi saat bencana terjadi. Analisis perencanaan pengurangan bencana, respons cepat terhadap bencana, koordinasi yang efektif, dan kebijakan rekonstruksi setelah bencana diperlukan.
2. Lembaga nirlaba dan organisasi kemanusiaan, memberikan bantuan kemanusiaan, layanan darurat, dan dukungan jangka panjang kepada korban bencana. Menyelamatkan nyawa, menawarkan bantuan, dan menjamin pemulihan yang berkelanjutan adalah prioritas organisasi yang terlibat.

3. Masyarakat sipil dan kelompok aktivis, memantau, mendukung, dan meningkatkan kapasitas komunitas terkait bencana dilakukan oleh masyarakat sipil dan kelompok aktivis. Mereka ingin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan bencana. Karena masyarakat berada di lokasi bencana secara langsung, mereka menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, upaya masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana. Dengan menjadi relawan dan membantu korban bencana, masyarakat memainkan peran penting dalam penanggulangan bencana.

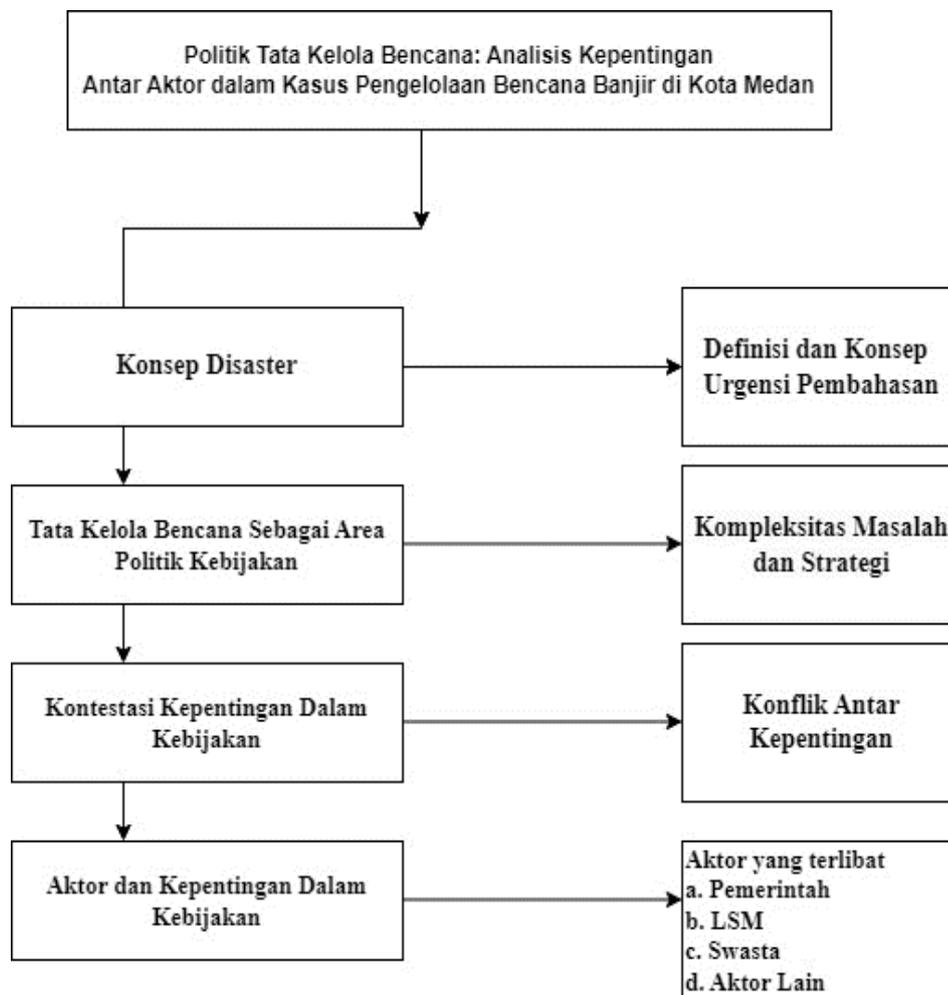
4. Sektor swasta, swasta dapat menawarkan bantuan keuangan, teknologi, atau infrastruktur dalam situasi bencana. Selain itu, mereka ingin melindungi aset dan bisnis mereka dari bahaya. Semua pihak, termasuk lembaga swasta, harus memainkan peran penting dalam hal ini. Lembaga swasta bertanggung jawab atas *CSR (Corporate Social Responsibility)* setelah bencana dengan memberikan bantuan logistik dan makanan. Sebagai *stakeholder* dalam mengatasi bencana, lembaga swasta dapat membantu para korban dengan mengumpulkan bantuan yang akan diberikan kepada korban bencana dan membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

5. Media Massa, bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran publik, dan mengawasi respons bencana. Untuk menyebarkan informasi yang akurat dan memberikan pemahaman tentang kondisi akibat bencana.

Kepentingan-kepentingan ini dapat bertentangan dan saling berinteraksi. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola kebijakan bencana yang efisien dan berkelanjutan, sangat penting untuk memungkinkan berbagai pihak yang terlibat saling bekerja sama.

1.7 Kerangka Pikir

Analisis Kepentingan Antar Aktor dalam Kasus Pengelolaan Bencana di Kota Medan dapat diukur melalui pengelolaan bencana banjir. Penelitian ini membuat suatu kerangka pikir agar membuat penelitian terhadap kasus ini lebih terkonsep.



1.8 Definisi Konseptual

Analisis kepentingan antar aktor dalam tulisan ini mengacu pada studi yang terkait dengan penanggulangan bencana oleh Tun Lin Moe & Pairote Pathranarakul (2006, hal. 396-413). Pemahaman tentang manajemen bencana banjir sebagai persoalan umum (common issue) memerlukan pemetaan struktur interaksi, keterlibatan, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam kontak langsung dengan akar penyebab dan korban bencana itu. Sebagai konsep Governance seperti dari Kooiman (1993) dan Pedroso (1999), para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat mencakup unsur pemerintah, dan pelaku non pemerintah, baik, swasta LSM, dan masyarakat. Tentu saja, berbagai peran dan tanggung jawab akan berbeda. Namun, pemerintah masih memiliki peran sebagai pembuat kebijakan (policy maker) dan pemangku kepentingan utama (principal stakeholder).

Pelayanan pemerintah yang baik perlu ditingkatkan. Setiap unit harus bekerja secara independen dan terkoordinasi dengan efektif, seperti halnya dalam menangani bencana. Suatu pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, dapat dianggap berhasil hanya jika warganya puas dengan kinerjanya. Tanggap darurat bencana membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta serta masyarakat agar pengelolaan bencana ini dapat dilakukan secara cepat dan terarah oleh setiap pihak. Pendekatan dan strategi yang digunakan dalam pengelolaan bencana alam atau insiden terkait bencana dikenal sebagai politik tata kelola bencana.

Pendekatan ini digunakan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengambil keputusan tentang respons dan mitigasi bencana. Dalam konteks analisis kepentingan antar aktor dalam kasus pengelolaan bencana banjir di Kota Medan, hal tersebut mencakup pemahaman tentang bagaimana berbagai pemangku kepentingan atau aktor berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan terkait bencana. Aspek konseptual politik tata kelola bencana adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan aktor: identifikasi dan pemahaman kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana. Ini mencakup tujuan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.
2. Koordinasi dan kolaborasi berfokus pada upaya untuk mengkoordinasikan tindakan dan upaya setiap pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi bencana.
3. Pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pemahaman tentang proses membuat dan menerapkan keputusan manajemen bencana. Melibatkan berbagai pihak yang berpartisipasi di dalam suatu pengambilan keputusan.
4. Akses informasi dan komunikasi tentang seberapa pentingnya mendapatkan informasi mengenai bencana dan cara mengatasi bencana dengan cepat dan akurat serta komunikasi yang efektif antara aktor yang terlibat.
5. Respons dan mitigasi tentang cara-cara yang digunakan oleh berbagai aktor untuk mengurangi dampak bencana.

1.9 Metode

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif melihat dan memahami apa yang ada yang dipandang sebagai masalah oleh banyak orang dan kelompok (Creswell, dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019). Ini berarti menghasilkan setiap gejala, atau fakta kejadian, secara terukur. (Hardani, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan antar aktor dalam pengelolaan banjir di Kota Medan. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana konvergensi dan divergensi antar aktor yang terlibat.

1.9.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian memiliki peran penting sebagai informan dalam pencarian data terkait dengan penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan banjir. Untuk Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan dan implikasi saling-silang kepentingan antar aktor.

Tabel 1.1 Profil Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Informan 1	Ketua Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Medan
2.	Informan 2	Masyarakat Kecamatan Medan Maimun
3.	Informan 3	Masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan
4.	Informan 4	Kepala Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Drainase Dinas SDABMBK Kota Medan
5.	Informan 5	Komunitas Labosude (Laskar Bocah Sungai Deli)

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari :

i. Data Primer

Jenis data yang diperoleh dari informan secara langsung. Beberapa metode umum untuk mendapatkan data primer ini adalah wawancara kepada informan dan observasi oleh peneliti secara langsung tanpa menggunakan perantara.

ii. Data Sekunder

Jenis data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari orang lain oleh peneliti untuk penelitian ini. Contoh data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen, jurnal, laporan, data, artikel serta bahan bacaan yang relevan terhadap topik penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai percakapan ataupun dialog antara dua orang atau lebih. Meskipun demikian, Moelong (2010) menganggap wawancara sebagai percakapan yang dilakukan dengan adanya tujuan tertentu. Peneliti dengan narasumber berbicara secara langsung untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Dilakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan kepentingan yang terjadi dan adanya implikasi saling-silang kepentingan antar aktor.

ii. Observasi

Observasi digunakan peneliti untuk pengumpulan data dengan mengamati subjek dan objek penelitian. Penelitian ini akan melihat bagaimana kepentingan aktor yang saling terlibat dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan berinteraksi dan bertindak.

iii. Dokumentasi

Dengan mencatat data sebelumnya yang tersedia, metode pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memilih dan memilah data yang relevan dengan hal-hal yang menjadi fokus dari penelitian. Penelitian ini akan mempelajari dan

mencatat dokumen seperti laporan bencana banjir dan kebijakan tata kelola bencana.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini diterapkan dengan menyusun data saat ini secara sistematis. Hasil dari penyusunan ini diperoleh melalui catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Dengan cara memilih data mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari analisis data, yang dilakukan melalui pendekatan analisis data kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas topik penelitian. Model analisis data dibagi menjadi tiga alur oleh Miles dan Huberman: a. reduksi data; b. penyajian data; dan c. penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh (Hardani, 2020).

i. Reduksi Data

Suatu tahapan dalam teknik analisis data yang ditujukan untuk memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang didapatkan di lapangan pada hal yang dianggap penting. Hal ini berguna untuk lebih menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif ke dalam tulisan melalui seleksi yang ketat. Di dalam penelitian, akan melakukan reduksi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data secara primer maupun data sekunder.

ii. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Ini dilakukan untuk membuat data penelitian mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data tentang analisis kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan.

iii. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Adanya data atau bukti yang valid diperlukan untuk mendukung kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan ini akan menjadi inti dari hasil penelitian. Kesimpulan ini akan menjelaskan pendapat dan hasil akhir berdasarkan uraian tersebut, dan biasanya akan menyertakan pendapat pribadi peneliti. Penarikan kesimpulan harus relevan terhadap fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan mengeksplorasi kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan.